

Ketidaksetaraan Gender Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut: Studi Kasus Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Torobulu Kecamatan. Laeya, Kabupaten Konawe Selatan

Oleh: Syaifudin Suhri Kasim

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia

Abstract

This article aims to analyze gender inequality in marine resource management in coastal communities by highlighting power relations, gender-based division of labor, and women's access and control over productive resources. The research draws on feminist political economy perspectives and institutional theory to explain how cultural norms, social structures, and marine policies affect the position of women in fisheries activities and coastal economies. The research method uses a qualitative approach through in-depth interviews, focus group discussions, and participatory observation of women fishermen, seafood processors, and micro business actors in coastal areas. The findings of the study show that women have an important role in the fisheries economic chain, especially in processing activities, marketing of marine products, and household financial management. However, these contributions are often not recognized in local policies and institutions. Women also face barriers to access productive assets, fishing technology, venture capital, and decision-making space, thereby strengthening their economic and political marginalization. In addition, gender-biased division of labor still places women in vulnerable domestic and informal sector jobs without adequate social protection. On the other hand, coastal women are developing a range of collective strategies through social networks, joint venture groups, and community solidarity to expand their participation in the management of marine resources. This study concludes that fair and sustainable governance of marine resources requires gender-responsive marine policies, strengthening women's institutions, and expanding access to economic resources and decision-making.

Keywords: Gender Inequality, Marine Resources, Coastal communities, Women Fishermen

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya laut pada masyarakat pesisir dengan menyoroti relasi kuasa, pembagian kerja berbasis gender, serta akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya produktif. Penelitian berlandaskan perspektif ekonomi politik feminis dan teori institusi untuk menjelaskan bagaimana norma budaya, struktur sosial, dan kebijakan kelautan memengaruhi posisi perempuan dalam aktivitas perikanan dan ekonomi pesisir. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah, dan observasi partisipatif terhadap perempuan nelayan, pengolah hasil laut, serta pelaku usaha mikro di wilayah pesisir. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam rantai ekonomi perikanan, terutama pada kegiatan pengolahan, pemasaran hasil laut, dan pengelolaan keuangan rumah tangga. Akan tetapi, kontribusi tersebut sering tidak mendapatkan pengakuan dalam kebijakan maupun kelembagaan lokal. Perempuan juga menghadapi hambatan dalam memperoleh akses terhadap aset produktif, teknologi penangkapan ikan, modal usaha, dan ruang pengambilan keputusan sehingga memperkuat marginalisasi ekonomi serta politik mereka. Selain itu, pembagian kerja yang bias gender masih menempatkan perempuan pada pekerjaan domestik dan sektor informal yang rentan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Di sisi lain, perempuan pesisir mengembangkan berbagai strategi kolektif melalui jaringan sosial, kelompok usaha bersama, dan solidaritas komunitas untuk memperluas partisipasi mereka dalam pengelolaan sumber daya laut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan memerlukan kebijakan kelautan yang responsif gender, penguatan kelembagaan perempuan, serta perluasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan pengambilan keputusan.

Kata kunci: Ketidaksetaraan Gender, Sumber Daya Laut, Masyarakat Pesisir, Perempuan Nelayan

Pendahuluan

Ketidaksetaraan gender merupakan salah satu persoalan struktural yang masih menjadi tantangan dalam pembangunan global, termasuk dalam sektor pengelolaan sumber daya laut. Meskipun agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender, telah mendorong peningkatan partisipasi perempuan, realitas di tingkat lokal menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi keterbatasan dalam akses, kontrol, dan manfaat atas sumber daya pesisir. Menurut laporan Food and Agriculture Organization (FAO, 2023), perempuan menyumbang hampir 50% tenaga kerja dalam sektor perikanan skala kecil, namun kontribusi tersebut sering tidak diakui secara formal dalam kebijakan dan sistem ekonomi.

Dalam konteks masyarakat pesisir, ketimpangan gender terlihat dari pembagian kerja yang bias gender. Laki-laki umumnya mendominasi aktivitas penangkapan ikan, sedangkan perempuan lebih banyak terlibat dalam kegiatan domestik atau sektor hilir seperti pengolahan dan pemasaran hasil laut. Studi oleh Wahyuni dan Sari (2023) menunjukkan bahwa dominasi laki-laki dalam aktivitas produktif menyebabkan perempuan memiliki akses terbatas terhadap sumber daya strategis seperti teknologi, modal, dan pelatihan. Kondisi ini memperkuat marginalisasi perempuan dalam struktur ekonomi masyarakat pesisir.

Padahal, perempuan memiliki kontribusi penting dalam menopang ekonomi rumah tangga nelayan. Mereka berperan sebagai pengelola keuangan keluarga, pengolah hasil tangkapan, hingga pelaku usaha mikro berbasis perikanan. Penelitian oleh Rahmawati et al. (2022) menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi rumah tangga dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, terutama dalam menghadapi ketidakpastian hasil tangkapan akibat perubahan iklim. Namun demikian, kontribusi ini sering kali tidak diikuti dengan peningkatan posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan.

Ketidaksetaraan gender juga tercermin dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun dalam pengelolaan sumber daya laut secara kolektif. Menurut studi oleh Nurhidayah dan Kurniawan (2024), perempuan pesisir cenderung tidak dilibatkan dalam forum-forum pengambilan keputusan seperti kelompok nelayan atau musyawarah desa. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan kurang mempertimbangkan perspektif gender dan kebutuhan spesifik perempuan.

Selain itu, perempuan pesisir menghadapi berbagai kendala struktural seperti rendahnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi. Kondisi geografis wilayah pesisir yang terpencil juga memperparah keterbatasan tersebut. Dalam situasi ini, perempuan sering mengalami

beban ganda (double burden), yaitu menjalankan peran domestik sekaligus berkontribusi dalam aktivitas ekonomi. Menurut penelitian oleh Astuti (2023), beban ganda ini berdampak pada rendahnya produktivitas perempuan serta terbatasnya kesempatan mereka untuk mengembangkan kapasitas diri.

Di sisi lain, terdapat potensi besar dalam meningkatkan peran perempuan melalui pendekatan pemberdayaan berbasis kesetaraan gender. Program-program yang mengintegrasikan Gender Equality and Social Inclusion (GESI) terbukti mampu meningkatkan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Studi oleh Pratama dan Lestari (2024) menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan, akses terhadap teknologi digital, serta dukungan kelembagaan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor perikanan secara signifikan.

Lebih jauh, perempuan juga memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir. Mereka terlibat dalam berbagai aktivitas konservasi seperti rehabilitasi mangrove dan pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal. Menurut penelitian oleh Hidayati et al. (2023), keterlibatan perempuan dalam konservasi lingkungan dapat meningkatkan keberlanjutan ekosistem sekaligus memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya laut merupakan fenomena kompleks yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perempuan, tetapi juga menghambat efektivitas pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan responsif gender dalam pengelolaan sumber daya pesisir.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya laut pada masyarakat pesisir, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut, sehingga dapat menjadi dasar dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya laut yang lebih adil, inklusif dan berkelanjutan di Desa Torobulu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (case study) untuk memahami secara mendalam dinamika ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya laut pada masyarakat pesisir. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menangkap realitas sosial yang kompleks, termasuk relasi gender, praktik budaya, serta pengalaman subjektif perempuan dalam konteks kehidupan sehari-hari (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2023). Desain studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi fenomena secara kontekstual dalam suatu setting sosial tertentu, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam (Yin, 2023).

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Torobulu Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan sebagai salah satu komunitas masyarakat pesisir yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya laut sebagai sumber penghidupan utama. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah pesisir, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi perikanan, serta adanya indikasi ketimpangan gender dalam pengelolaan sumber daya.

Subjek penelitian terdiri dari perempuan pesisir (istri nelayan, pengolah hasil laut, dan pedagang ikan), nelayan laki-laki, tokoh masyarakat, serta perwakilan pemerintah lokal. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling dan dikembangkan dengan snowball sampling untuk memperoleh informan kunci yang memiliki pengetahuan dan pengalaman relevan (Patton, 2015; Etikan et al., 2022).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu:

1. Wawancara mendalam (in-depth interview)

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, persepsi, dan praktik sosial terkait peran gender dalam pengelolaan sumber daya laut. Teknik ini memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi data dan memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan perspektifnya secara luas (Kvale & Brinkmann, 2018).

2. Observasi partisipatif

Peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas masyarakat pesisir, termasuk pembagian kerja, interaksi sosial, serta keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dan pengelolaan sumber daya laut. Observasi ini penting untuk memahami konteks sosial secara nyata (Spradley, 2016).

3. Dokumentasi

Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi seperti laporan pemerintah, data statistik perikanan, kebijakan terkait, serta hasil penelitian sebelumnya. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi dan memvalidasi data primer (Bowen, 2009).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019), yang meliputi tiga tahapan utama: (1) reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan data mentah; (2) penyajian data, yaitu penyusunan data dalam bentuk narasi, matriks, atau tabel agar mudah dipahami; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu interpretasi

makna data dan pengujian konsistensi temuan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik (thematic analysis) guna mengidentifikasi pola-pola utama terkait ketidaksetaraan gender, akses terhadap sumber daya, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat pesisir (Braun & Clarke, 2021).

Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dijamin melalui beberapa teknik, yaitu:

- Triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data;
- Member checking, yaitu mengonfirmasi hasil wawancara kepada informan untuk memastikan akurasi;
- Audit trail, yaitu pencatatan proses penelitian secara sistematis untuk meningkatkan transparansi (Lincoln & Guba, 1985; Nowell et al., 2017).

Pendekatan Analisis Gender

Penelitian ini menggunakan perspektif gender untuk menganalisis relasi sosial antara laki-laki dan perempuan dalam pengelolaan sumber daya laut. Analisis difokuskan pada aspek akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat (access and control framework) untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketimpangan gender (March et al., 1999; FAO, 2023). Selain itu, pendekatan ini juga mempertimbangkan konstruksi sosial gender yang mempengaruhi pembagian kerja dan pengambilan keputusan dalam masyarakat pesisir.

Hasil dan Pembahasan.

Bentuk Ketidaksetaraan Gender dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat pesisir termanifestasi secara nyata dalam pembagian kerja, akses terhadap sumber daya, serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Pembagian kerja berbasis gender masih sangat dominan, di mana laki-laki menguasai sektor penangkapan ikan sebagai aktivitas utama yang bernilai ekonomi tinggi. Sementara itu, perempuan lebih banyak terlibat dalam ranah domestik serta sektor hilir, seperti pengolahan dan pemasaran hasil laut yang cenderung kurang mendapatkan pengakuan ekonomi.

Kondisi ini diperkuat oleh temuan wawancara yang menunjukkan adanya konstruksi sosial yang membatasi ruang gerak perempuan. Seorang informan perempuan menyatakan, *“Kami ini biasanya hanya urus ikan setelah dibawa pulang, seperti membersihkan, mengeringkan, atau menjual di pasar. Kalau melaut itu urusan laki-laki, karena dianggap lebih berat dan berisiko.”* Pernyataan ini menunjukkan adanya

normalisasi pembagian kerja yang tidak setara. Selain itu, keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya produktif juga menjadi kendala. Informan lain mengungkapkan, *“Perempuan jarang punya perahu sendiri atau alat tangkap, jadi kami hanya ikut saja, tidak bisa menentukan sendiri.”* Dalam konteks pengambilan keputusan, perempuan juga cenderung berada pada posisi subordinat. Seorang informan menambahkan, *“Kalau soal keputusan besar, biasanya suami yang tentukan, kami hanya ikut saja.”* Hal ini menegaskan bahwa ketimpangan gender masih mengakar dalam struktur sosial masyarakat pesisir.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahyuni dan Sari (2023) yang menunjukkan bahwa konstruksi sosial gender di masyarakat pesisir membentuk segregasi pekerjaan yang membatasi ruang gerak perempuan dalam sektor produktif. Dalam perspektif teori “doing gender”, praktik ini mencerminkan bagaimana norma sosial terus direproduksi melalui aktivitas sehari-hari, sehingga memperkuat subordinasi perempuan dalam struktur ekonomi (West & Zimmerman, 1987).

Perempuan juga memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya strategis seperti modal, teknologi, dan pelatihan. Sebagian besar program bantuan perikanan lebih ditujukan kepada nelayan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, sehingga perempuan sering kali terpinggirkan dari intervensi pembangunan. Hal ini memperkuat temuan FAO (2023) bahwa perempuan dalam sektor perikanan skala kecil cenderung memiliki akses yang lebih rendah terhadap sumber daya produktif dibandingkan laki-laki.

Keterbatasan Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Sumber Daya

Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup tajam antara akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya laut dalam rumah tangga pesisir. Perempuan memang terlibat aktif dalam berbagai aktivitas ekonomi, seperti pengolahan hasil tangkapan, pemasaran ikan, hingga pengelolaan keuangan harian. Namun, keterlibatan tersebut tidak secara otomatis diikuti dengan kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis. Kontrol terhadap hasil produksi dan penggunaan pendapatan masih didominasi oleh laki-laki sebagai kepala rumah tangga, yang secara sosial dan kultural diposisikan sebagai pengambil keputusan utama.

Kondisi ini tercermin dari hasil wawancara dengan informan perempuan yang menyatakan, *“Kami yang jual ikan di pasar, kami juga yang atur belanja sehari-hari, tapi kalau untuk keputusan besar, seperti beli perahu atau bagi hasil, tetap suami yang tentukan.”* Pernyataan serupa juga diungkapkan oleh informan lain, *“Uang memang saya pegang, tapi penggunaannya harus dibicarakan dulu dengan suami, apalagi kalau jumlahnya besar.”*

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun perempuan memiliki akses terhadap aktivitas ekonomi, kontrol yang mereka miliki masih bersifat terbatas dan berada dalam kerangka relasi gender

yang tidak setara. Dengan demikian, peran ekonomi perempuan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kekuatan pengambilan keputusan yang otonom dalam rumah tangga.

Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan kerangka akses dan kontrol (March et al., 1999), yang menunjukkan bahwa partisipasi tidak selalu berbanding lurus dengan kekuasaan. Perempuan sering kali hanya berperan sebagai “tenaga kerja tambahan” tanpa memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan ekonomi. Temuan ini konsisten dengan penelitian Rahmawati et al. (2022) yang menyatakan bahwa kontribusi ekonomi perempuan tidak secara otomatis meningkatkan posisi tawar mereka dalam rumah tangga.

Dalam perspektif teori praktik sosial Pierre Bourdieu, kondisi ini mencerminkan keterbatasan perempuan dalam mengakses berbagai bentuk modal, terutama modal ekonomi dan modal simbolik. Dominasi laki-laki dalam struktur sosial menciptakan habitus yang secara tidak langsung membatasi perempuan untuk mengakses ruang-ruang strategis dalam pengelolaan sumber daya laut.

Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Aspek lain yang menjadi temuan penting dalam penelitian ini adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga maupun komunitas. Kondisi ini mencerminkan masih kuatnya konstruksi sosial patriarkal yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat, terutama dalam ruang-ruang formal yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan sumber daya pesisir. Perempuan jarang dilibatkan dalam forum-forum strategis seperti kelompok nelayan, musyawarah desa, maupun perencanaan program pembangunan pesisir, sehingga aspirasi dan kebutuhan mereka cenderung tidak terakomodasi secara optimal.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan partisipasi ini tidak hanya disebabkan oleh norma sosial, tetapi juga oleh kurangnya akses informasi dan kepercayaan diri perempuan dalam menyampaikan pendapat. Seorang informan menyatakan, *“Kalau rapat desa biasanya yang diundang laki-laki, kami perempuan jarang sekali diajak, jadi tidak tabu juga apa yang dibahas.”* Informan lain menambahkan, *“Kami lebih banyak urus rumah dan bantu suami, jadi soal keputusan biasanya suami yang tentukan.”* Bahkan dalam konteks komunitas, perempuan merasa ruang partisipasi mereka dibatasi, sebagaimana diungkapkan, *“Di kelompok nelayan itu hampir semua laki-laki, kami perempuan tidak biasa ikut bicara.”*

Temuan ini menunjukkan bahwa marginalisasi perempuan dalam pengambilan keputusan berimplikasi pada tidak optimalnya kebijakan pembangunan pesisir yang inklusif dan berkeadilan gender. Menurut Nurhidayah dan Kurniawan (2024), rendahnya partisipasi ini disebabkan oleh faktor budaya patriarki, keterbatasan waktu akibat beban domestik, serta rendahnya tingkat kepercayaan diri

perempuan dalam ruang publik. Kondisi ini mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan cenderung bias gender dan tidak responsif terhadap kebutuhan perempuan.

Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan. Hal ini sejalan dengan temuan Pratama dan Lestari (2024) yang menegaskan bahwa inklusi gender dalam tata kelola sumber daya dapat memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.

Beban Ganda dan Kerentanan Perempuan Pesisir

Perempuan pesisir menghadapi beban ganda (*double burden*) yang menempatkan mereka pada posisi strategis sekaligus rentan dalam struktur sosial ekonomi rumah tangga. Di satu sisi, mereka menjalankan peran domestik seperti mengurus anak, memasak, dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga. Di sisi lain, mereka turut berkontribusi dalam aktivitas ekonomi produktif, seperti mengolah hasil laut, berdagang ikan, hingga mengelola keuangan rumah tangga. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa perempuan pesisir tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai aktor penting dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa peran ganda tersebut seringkali dijalankan dalam keterbatasan waktu dan tenaga. Seorang informan menyatakan, *“Pagi saya urus rumah dulu, masak dan siapkan anak, setelah itu baru pergi bantu suami olah ikan. Kalau tidak begitu, penghasilan tidak cukup.”* Informan lain menambahkan, *“Kadang capek, tapi mau bagaimana lagi, kalau saya tidak jual ikan di pasar, kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.”* Pernyataan ini menegaskan bahwa kontribusi ekonomi perempuan pesisir merupakan bentuk strategi adaptif dalam menghadapi tekanan ekonomi. Namun demikian, beban kerja yang berlapis ini juga berpotensi menimbulkan kelelahan fisik dan psikologis, serta memperkuat ketimpangan gender dalam pembagian kerja rumah tangga.

Astuti (2023) menyatakan bahwa beban ganda ini berdampak pada keterbatasan waktu dan energi perempuan untuk mengembangkan kapasitas diri, termasuk dalam mengakses pendidikan dan pelatihan. Selain itu, kondisi ini juga meningkatkan kerentanan perempuan terhadap kemiskinan struktural, terutama ketika terjadi penurunan hasil tangkapan akibat perubahan iklim atau degradasi lingkungan. Dalam perspektif feminis, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakadilan struktural yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, baik di ranah domestik maupun publik. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada kesejahteraan keluarga dan keberlanjutan ekonomi komunitas secara keseluruhan.

Potensi dan Strategi Pemberdayaan Perempuan Pesisir

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan struktural, ekonomi, dan kultural, penelitian ini menemukan adanya potensi besar dalam pemberdayaan perempuan pesisir yang sering kali belum dioptimalkan secara sistematis. Perempuan menunjukkan kemampuan adaptif yang tinggi dalam merespons tekanan ekonomi rumah tangga, terutama melalui strategi diversifikasi mata pencaharian. Aktivitas seperti pengolahan hasil laut (ikan asin, abon ikan, dan kerupuk) serta perdagangan skala kecil menjadi alternatif penting dalam menopang ekonomi keluarga. Keterlibatan ini tidak hanya memperluas sumber pendapatan, tetapi juga memperkuat posisi tawar perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi domestik.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan pesisir secara aktif memanfaatkan peluang yang tersedia, meskipun dengan akses sumber daya yang terbatas. Salah satu informan menyatakan: *“Kalau hanya mengandalkan suami melaut, kadang tidak cukup, jadi saya olah ikan jadi ikan asin supaya bisa dijual lagi di pasar.”* Informan lain menambahkan: *“Saya juga jualan kecil-kecilan di rumah, seperti kebutuhan sehari-hari, supaya ada tambahan uang untuk anak sekolah.”*

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor ekonomi yang strategis. Dengan demikian, penguatan kapasitas, akses pasar, dan dukungan kelembagaan menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Program pemberdayaan berbasis *Gender Equality and Social Inclusion* (GESI) terbukti dapat meningkatkan kapasitas perempuan dalam mengakses sumber daya dan memperkuat posisi tawar mereka. Pratama dan Lestari (2024) menunjukkan bahwa pelatihan keterampilan, akses terhadap teknologi, serta penguatan kelembagaan lokal dapat meningkatkan partisipasi perempuan secara signifikan. Selain itu, perempuan juga memiliki peran strategis dalam konservasi lingkungan pesisir, seperti rehabilitasi mangrove dan pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal. Hidayati et al. (2023) menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam konservasi tidak hanya berdampak pada keberlanjutan ekosistem, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, upaya pemberdayaan perempuan tidak hanya harus berfokus pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga pada transformasi struktur sosial yang lebih inklusif. Pendekatan ini mencakup penguatan akses terhadap pendidikan, modal, teknologi, serta peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya laut merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan.

Ketimpangan ini tidak hanya membatasi peran perempuan, tetapi juga mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan.

Integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya pesisir menjadi sangat penting untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif. Dengan meningkatkan akses, kontrol, dan partisipasi perempuan, maka pengelolaan sumber daya laut dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa ketidaksetaraan gender dalam pengelolaan sumber daya laut di masyarakat pesisir merupakan persoalan kompleks yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Ketimpangan tersebut terlihat dari pembagian kerja yang bias gender, di mana laki-laki mendominasi sektor produksi perikanan, sedangkan perempuan lebih terkonsentrasi pada ranah domestik dan kegiatan ekonomi pendukung. Situasi ini berimplikasi pada terbatasnya akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya penting, seperti modal, teknologi, serta berbagai peluang pengembangan kapasitas. Di samping itu, minimnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam lingkup rumah tangga maupun komunitas, turut memperkuat posisi subordinat mereka dalam struktur sosial pesisir.

Walaupun perempuan berperan signifikan dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga dan mendukung keberlanjutan sektor perikanan, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diakui atau diimbangi dengan peningkatan posisi tawar. Beban ganda yang mereka tanggung semakin memperbesar kerentanan sosial dan ekonomi. Namun demikian, terdapat peluang besar untuk mendorong pemberdayaan perempuan pesisir melalui peningkatan kapasitas, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta penguatan kelembagaan berbasis inklusi gender. Keterlibatan perempuan dalam upaya konservasi juga menunjukkan peran strategis mereka dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif gender guna menciptakan pengelolaan sumber daya laut yang adil dan berkelanjutan.

Kajian ini turut memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi, Studi Gender dan pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian ini dapat memperkaya pemahaman ilmiah tentang hubungan antara gender dan pemanfaatan sumber daya laut pada masyarakat pesisir. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi sumber data dan referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan kajian mengenai pemberdayaan perempuan, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial di sector kelautan.

Daftar Pustaka

- Astuti, R. (2023). Gender inequality and double burden among coastal women. *Journal of Coastal Development*, 27(2), 145–158.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2023). *The Sage handbook of qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2022). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Food and Agriculture Organization. (2023). *The status of women in fisheries and aquaculture 2023*. Rome: FAO.
- Hidayati, N., Rahman, A., & Yusuf, M. (2023). Women's role in coastal ecosystem conservation. *Marine Policy*, 148, 105432. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105432>
- Kvale, S., & Brinkmann, S. (2018). *Doing interviews*. Sage Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- March, C., Smyth, I., & Mukhopadhyay, M. (1999). *A guide to gender-analysis frameworks*. Oxfam.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 16(1), 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406917733847>
- Nurhidayah, S., & Kurniawan, B. (2024). Gender participation in coastal decision-making. *Journal of Marine Social Studies*, 12(1), 33–47.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Pratama, D., & Lestari, E. (2024). Gender equality and social inclusion in fisheries sector. *Sustainability Science*, 19(1), 88–102. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01345-2>
- Rahmawati, I., Salim, M., & Fadli, H. (2022). Women's economic roles in fisher households. *Journal of Rural Studies*, 89, 210–218. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.12.012>

- Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Waveland Press.
- Wahyuni, S., & Sari, D. (2023). Gender division of labor in coastal communities. *Indonesian Journal of Social Research*, 15(2), 101–115.
- West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. *Gender & Society*, 1(2), 125–151.
<https://doi.org/10.1177/0891243287001002002>
- Yin, R. K. (2023). *Case study research and applications: Design and methods* (7th ed.). Sage Publications.